

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan AS dan Islam menjadi salah satu sorotan utama dalam politik internasional terutama paska peristiwa besar 9/11 di AS. Sebagaimana banyak disebutkan oleh para pemikir, media dan bahkan pemerintah AS sendiri langsung mengarahkan tuduhannya kepada kelompok – kelompok Islam anti Barat, seperti Al-Qaeda yang dijadikan suspect utama pelaku pengeboman di gedung kembar WTC, yang kemudian dikenal sebagai kelompok Islam radikal, lebih khusus lagi presiden AS George W. Bush menyebutnya sebagai pelaku terorisme internasional.

Namun jika menelusuri sejarah hubungan keduanya, terutama berkaitan dengan intelektualitas, maka kita mesti sangat terkejut bagaimana hubungan keduanya sangat berjalan baik dengan kata lain tidak ada hubungan sebaik hubungan Islam dan AS. Sebagaimana disebutkan dalam pidato presiden terbaru AS Barack Obama di Mesir, dimana hubungan terlama AS dan Islam bisa kita temui ketika kerajaan Maroko menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan AS¹. Dan tahun 1778, presiden George Washington dan Sultan Alawi Muhammad III menandatangani perjanjian persahabatan diplomatik yang berisi tentang pengamanan bersama kapal – kapal berbendera AS dari para bajak laut,

¹ *Teks Pidato Barack Obama di Mesir*, <http://triwahjono.wordpress.com>, diakses 29 November 2009.

kedua peristiwa ini seperti menjadi justifikasi terbaik tentang bagaimana hubungan keduanya.

Saat ini hubungan keduanya diyakini sebagai hubungan yang tidak harmonis, saling melontarkan tuduhan – tuduhan diantara keduanya, bahkan juga diyakini bahwa para pembuat keputusan AS menggunakan kata “islamic terror” sebagai sebutan pengganti “the comunist menace”, sebutan AS bagi Rusia, lawan dalam perang dingin. Sebutan lain semisal “evil empire” juga dipakai ketika AS menyebut pemerintahan revolusi Iran.²

Memburuknya hubungan AS dan Islam dianggap sebagai hasil dari kebijakan – kebijakan AS atas dunia Islam pada umumnya dan Timur Tengah pada khususnya. Diantaranya berkaitan dengan masalah kegagalan AS menyelesaikan persengketaan antara Israel-Palestina, buruknya dan lamanya penyelesaiannya masalah keduanya memunculkan kecurigaan masyarakat dunia Islam akan adanya keberpihakan AS atas Israel dan minimnya keadilan atas dunia Islam. Hal ini diperparah juga dengan ketidakadilan AS dalam menyebarkan ideologi demokrasinya seperti yang terjadi di Arab Saudi. Kebijakan – kebijakan AS atas dunia Islam yang cenderung menghilangkan asas keadilan ini merupakan salah satu alasan mulai membangkitanya kelompok – kelompok Islam anti-Amerika.

Penggunaan kata – kata baru dalam menyebutkan eksistensi Islam politik telah lama dilakukan oleh AS. Namun yang paling mencolok terjadi paska peristiwa

² Mamoun Fandy, “Islamists and U.S. Policy,” *Foreign Policy in Focus* vol 1, no. 21 (1996): hal 2.

11 September 2001. Dimana Amerika Serikat meyakini bahwa kelompok Islam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Islam radikal dan Islam moderat. Salah satunya ditunjukkan oleh banyak pemikir Amerika Serikat, seperti John L. Esposito yang menggunakan Islam radikal dan Islam moderat dalam membedakan sumber surveinya dalam sebuah buku karangannya yang berjudul “*Saatnya Muslim Berbicara?*”. Daniel Pipes, juga menulis bahwa jika Islam militan adalah sumber masalah maka solusinya adalah muslim moderat.³

Penggolongan Islam juga dipakai oleh Angel Rabasa, Ph.D, senior analisa kebijakan, dalam sebuah diskusi berjudul *Committee on Armed Services Defense Review Terrorism and Radical Islam Gap Panel United States House of Representative*, selain itu Angel Rabasa melontarkan pernyataan tentang perbedaan antara Islam radikal dan Islam moderat.⁴ Dalam diskusi itu Angel Rabasa menyatakan bahwa adanya penggunaan atau pembenaran kekerasan dalam mencapai tujuan merupakan pembeda utama Islam radikal dan Islam moderat.

Dalam laporannya kepada angkatan udara Amerika Serikat, yang berjudul *The Muslim World After 9/11* tahun 2007, Angel Rabasa dan Cheryl Benard juga menuliskan bahwa saat ini Islam telah terbagi menjadi beberapa kelompok dalam memandang dan mengaplikasikan keislamannya. (lihat tabel Tipologi Kelompok Islam dan tabel Pandangan Kelompok Islam terhadap Demokrasi dan Kekerasan).

³ Daniel Pipes, *Mengidentifikasi Muslim Moderat* di akses melalui www.jewishworldview.com, pada Juli 2010.

⁴ *Statement of Angel Rabasa, Ph.D*, <http://www.rand.org> , diakses pada 27 November 2009.

Sejarah penyebutan bagi Islam radikal pertama kali populer ketika terjadinya revolusi Iran tahun 1979, saat itu pendudukan kedutaan Besar AS di Teheran dianggap sebagai momentum meluasnya praktek Islam fundamental. Paska revolusi Iran, stabilitas politik di Saudi Arabia juga ikut mengalami guncangan ketika kelompok Islam radikal menduduki masjidil Haram di Makkah pada tahun yang sama.

Namun penggunaan istilah ini mencuat paska 9/11, selain itu istilah Islam moderat juga ikut muncul mengikuti. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan pernyataan presiden George W. Bush yang menyebut bahwa dunia kini terbagi menjadi dua sehingga dunia harus memilih antara bersama dengan Amerika Serikat atau menjadi musuh bagi Amerika Serikat.

Praktisi politik AS dibawah pemerintahan Clinton, Robert Pelletreau dan Anthony Lake, menyebut keinginan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka dengan Islam moderat dalam kebijakan luar negerinya,⁵ saat itu AS melakukan hubungan baik dengan rezim Taliban di Afghanistan. Ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan AS selama masa pendudukan Soviet di Afghanistan dimana AS melakukan eksploitasi Islam dengan melaksanakan kampanye anti-Soviet, dan anti ideologi komunis, dan melakukan komunikasi – komunikasi dengan golongan moderat seperti ulama.

⁵ Amerika, Islam dan Dunia Muslim Moderat, www.opensubscriber.com, diakses pada 5 November 2009.

Kondisi ini bertolak belakang ketika presiden George W. Bush mengumumkan perang melawan terorisme internasional, paska peristiwa 9/11 2001, dimana AS tak lagi melakukan hubungan baik dengan rezim Taliban tapi sebaliknya kini keduanya saling serang di tanah Afghanistan, dan juga AS menjadikan rezim Taliban sebagai golongan radikal. Kebijakan ini tak lepas dari tuduhan AS atas rezim Taliban yang tak lagi moderat dengan menolak ideologi – ideologi dan kebijakan – kebijakan AS seperti penegakkan demokrasi dan juga tuduhan tentang Al-Qaeda yang berada di balik rezim Taliban, bahkan AS mengupayakan penggulingan rezim yang dulu dibelanya ini⁶ sebagai realisasi dari kebijakan preemptive atau preventif yang disampaikan oleh presiden Bush di West Point.

Kehadiran kelompok Islam radikal tidak hanya dijadikan sebagai musuh oleh AS, selain itu AS juga melakukan kampanye – kampanye anti Islam radikal, diantaranya dengan mengajak tak hanya sekutu Eropanya tapi juga rezim – rezim di dunia Islam untuk bersama – sama memerangi teror internasional.

AS bersikap keras atas rezim yang dianggap sebagai Islam radikal. AS dan negara - negara sekutunya bahkan memiliki nama – nama gerakan Islam yang dianggap radikal dan mempublikasikannya sebagai organisasi terlarang. Al-Qaeda adalah salah satunya, Al-Qaeda dianggap sebagai gerakan radikal karena melakukan usaha – usaha kekerasan atau teror dalam aksinya, salah satunya adalah pengeboman gedung WTC tahun 2001.

⁶ *Amerika dan Dunia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal.366.

Selain melarang beroperasinya Al-Qaeda, tak hanya di Amerika sendiri, AS juga mengajak sekutunya unttuk menolak dan menyerang Al-Qaeda sebagaimana disampaikan presiden G.W. Bush dalam pidatonya ketika menyerukan perang melawan terorisme internasional. Selain melakukan serangan langsung dengan sasaran utama Al-Qaeda, AS juga melancarkan serangan pemikiran dengan menyatakan bahwa kekerasan – kekerasan terorisme yang terjadi bersumber dari kelompok Islam radikal yang anti-Amerika. Selain melakukan operasi militer di daerah yang dianggap sebagai tempat persembunyian Al-Qaeda, AS juga melakukan sanksi bagi negara ataupun kelompok yang ikut menyembunyikan Al-Qaeda, seperti yang terjadi di Irak.

Sikap yang berbeda terus ditunjukkan oleh AS atas Islam radikal dan Islam moderat di dunia muslim. AS melakukan pendekatan – pendekatan atas kelompok Islam moderat yang lebih banyak bergerak dibidang pendidikan dan kemasyarakatan. Usaha ini oleh AS dianggap sebagai pendekatan yang lebih efisien dan jauh dari kekerasan, karena yang akan disentuh adalah pola pemikiran masyarakat, dengan mengubah sentimen anti-Amerika masyarakat muslim, selain itu selama ini kelompok – kelompok moderat cenderung menjadi patner rezim yang sedang berkuasa demi menekan perkembangan Islam radikal.

Di beberapa negara muslim, AS memberikan bantuan bagi kelompok – kelompok moderat dengan membangun lembaga – lembaga batuan, baik yang mengatasnamakan Amerika secara langsung maupun yang tidak langsung, yang nantinya dijadikan tempat untuk melahirkan kelompok – kelompok moderat yang

berpihak pada AS. Sebuah LSM internasional bernama Heritage Foundation milik Josep Coors dan Paul Weyrich yang dijadikan rujukan kebijakan pada masa pemerintahan Ronald Reagen sering memberikan bantuan dana untuk beasiswa maupun penelitian.

Di Iran LSM ini bernama Institute for Hemispheric Development.⁷ Lembaga ini jugalah yang memberikan rekomendasi AS untuk mendukung media dalam mempublikasikan contoh – contoh aplikasi syari’ah, seperti hukum rajam yang dipraktikkan rezim Taliban di Afghanistan, atau peristiwa bom bunuh diri, serangan – serangan yang bersifat kekerasan dengan Al-Qaeda sebagai pelakunya.

Dalam mengidentifikasi kelompok Islam moderat, biasanya diajukan pertanyaan – pertanyaan seperti;⁸ apakah anda mendukung penggunaan kekerasan? Apakah anda mendukung demokrasi? Apakah anda ingin Sharia diterapkan? Dan masih banyak lagi.

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Indonesia merupakan dua contoh diantaranya. Keduanya dianggap sebagai kelompok Islam moderat karena menerima demokrasi serta asas – asas seperti toleransi beragama. Nahdatul Ulama misalnya menjalin kerjasama dengan The Asia Foundation dan The Ford Foundation sebagai patner dalam mengkomunikasikan demokrasi terhadap para

⁷ Islam dalam Buku Baru Huntington “Who Are We”, diakses dari www.suaramedia.com pada 27 November 2009.

⁸ Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, and Peter Sickle. *Building Moderate Muslim Networks*, www.rand.org, diakses pada 25 Juli 2010.

pengikutnya.⁹ Masih di Indonesia, The Asia Foundation juga mendirikan International Center for Islam and Pluralism (ICIP), tujuan didirikannya ICIP adalah untuk membangun jaringan organisasi muslim non pemerintah yang bisa menjadi wadah bagi aktifitas intelektual muslim se-Asia Tenggara. Di Timur Tengah Parti de Justice et Developpement (Party Justice and Development/PJD) di Maroko, atau Ikhwanul Muslim di Yordania dianggap sebagai kelompok Islam yang moderat. Sehingga keduanya menjadi kelompok Islam yang ikut dirangkul oleh Amerika Serikat.¹⁰

Keberadaan kelompok Islam moderat di dunia Islam seperti kelompok Islam liberal dan kelompok feminisme yang mulai berkembang juga menjadi patner terbaik AS di duni Islam. Islam moderat sendiri adalah kelompok Islam yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang toleran sehingga bentuk kekerasan seperti yang dipraktikkan oleh Islam radikal dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itulah keberadaan kelompok Islam moderat seperti ini terus dipertahankan dan didukung oleh AS.

Perbedaan sikap atas Islam radikal dan Islam Moderat yang ditunjukkan oleh Amerika ini menjadi suatu kondisi yang menurut penulis sangat tepat dikaji, berdasar latar belakang yang telah dipaparkan kemudian penulis memilih judul “Kepentingan Amerika Serikat Membuat Dikotomi Islam Politik Melalui Label Islam Radikal dan Islam Moderat”

⁹ Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, and Peter Sickle, *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya dikotomi atas Islam politik melalui label Islam radikal dan Islam moderat
2. Untuk mengetahui sikap Amerika Serikat atas dikotomi Islam politik melalui label Islam radikal dan Islam moderat
3. Untuk mengetahui kepentingan – kepentingan Amerika Serikat dengan bersikap berbeda atas Islam radikal dan Islam moderat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Mengapa sikap AS berbeda terhadap Islam Radikal dan Islam Moderat?”

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menganalisa dan menjelaskan pokok permasalahan diatas dapat digunakan teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy*) bersama – sama dengan konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*).

Politik Luar Negeri dan Kepentingan Nasional

Politik Luar Negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton;

“Foreign policy is strategy or planned course of action developed by the decision makers of vis avis other states or international entities, aimed as achieving specific goals defined intern of international interest”¹¹

Dari definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa politik luar negeri suatu negara adalah strategi atau rangkaian kegiatan tindakan yang terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain maupun suatu entitas yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi dalam kepentingan nasional.¹²

Jadi politik luar negeri bertujuan untuk mewujudkan cita – cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Dengan kata lain, politik luar negeri diartikan sebagai tindakan nyata suatu negara dalam mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasionalnya atau lebih tepatnya berdasarkan pada dinamika politik dalam negerinya. Disinilah kemudian ketika perlu juga mengkaji tentang konsep kepentingan nasional.

Kepentingan nasional adalah unsur penting dalam sebuah interaksi antar negara maupun kelompok transnasional dalam hubungan internasional. Ada dua karakteristik dalam sebuah interaksi diantara negara maupun kelompok yaitu, kerjasama dan konflik, dimana persamaan kepentingan bisa membawa pada kecenderungan terciptanya kerjasama, dan sebaliknya perbedaan kepentingan bisa membawa pada kecenderungan terjadinya konflik.

¹¹ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional terj. Wawan Juanda*, 3rd ed. (England: clio Press Ltd., 1990), hal.5.

¹² Jack C. Plano dan Roy Olton, *Ibid*.

Definisi umum tentang konsep kepentingan nasional dari Jack C. Plano dan Roy Olton yang menyatakan bahwa kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan dan keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.¹³

Lebih jauh Hans J. Morgenthau menjelaskan tentang perumusan kepentingan nasional suatu negara bersama – sama dengan konsep *power*, ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan *pengendalian* suatu negara atas negara lain.¹⁴ Selain itu Morgenthau juga menyebut bahwa konsep kepentingan nasional itu mirip dengan konstitusi Amerika, dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain.¹⁵

Gideon Rose menyatakan dalam pengantar *Foreign Affair*,¹⁶ bahwa peristiwa 9/11 mau tak mau membawa AS harus menghadapi musuh baru dan mendapati diri mereka terseret dalam pertikaian dengan politik muslim. Pernyataan

¹³Jack C. Plano dan Roy Olton, *Ibid*, hal 7.

¹⁴ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1990), 140.

¹⁵ *Ibid*, 141.

¹⁶ *Amerika dan Dunia*, Op.Cit, hal.xiii.

ini membawa kita pada kenyataan bahwa AS memiliki keyakinan tentang kepentingan nasionalnya mengalami ancaman dari belahan dunia Islam.

Maka ada kewajiban untuk AS melakukan suatu usaha dalam menyelamatkan setiap kepentingan nasional, dengan cara memutuskan kebijakan – kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam konteks AS, kepentingan nasional yang ingin dicapai AS dari waktu ke waktu adalah;¹⁷

1. Mempertahankan negara AS dan sistem konstitusionalnya.
2. Perluasan eksistensi ekonomi AS dan mempromosikan produk – produknya ke luar negeri.
3. Menciptakan suatu tata dunia baru atau sistem keamanan internasional yang favorable.
4. Mempromosikan nilai – nilai demokrasi AS dan sistem pasar bebasnya.

Lalu apa kepentingan AS di dunia Islam? Kepentingan nasional AS di dunia muslim pada mulanya adalah akses minyak, menghalangi Uni Soviet, dan menangani konflik Arab-Israel¹⁸ dan menegakkan demokrasi. Ini sesuai dengan strategi presiden Clinton tentang tatanan pasca perang dingin, disebut dengan ekspansi demokrasi dan pasar terbuka.

Paska 9/11 kepentingan nasional AS lebih mengarah pada pengamanan akses minyak dan penegakkan demokrasi, di dunia Islam pada umumnya dan Timur Tengah pada khususnya, ini mengingat kebijakan Bush yang meyakini bahwa

¹⁷ Donald E. Nuchterlein, *American Recommitted: US National Interest in A Restructured World*, (Kentucky: The University of Kentucky, 1991).

¹⁸ John L. Esposito, *Saatnya Muslim Bicara*, (Bandung: Mizan, 2007), hal.85.

kemunculan kelompok Islam radikal telah mengancam ideologi demokrasi liberal yang dianggap sekular. Oleh sebab itu kemudian kebijakan AS mengalami perubahan terutama berkaitan dengan Islam politik. Keyakinan AS tentang ancaman dari Islam politik yang tumbuh di dunia Islam dapat menghambat bahkan merusak kepentingan nasionalnya.

Islam moderat adalah Islam politik yang selama ini menjadi partner AS dalam mencapai kepentingan mengamankan akses minyak, atau menghalangi masuknya pengaruh Uni Soviet dan juga dalam usaha menciptakan perdamaian Arab-Israel. Namun seiring dengan keluarnya Uni Soviet dan tidak selesainya konflik Palestina dengan Israel, membawa atmosfer politik baru. Ada kecenderungan anti-AS di negara – negara yang dulu adalah sekutu AS. Perlawanan – perlawanan atas kehadiran AS di dunia Islam memunculkan gelombang – gelombang perlawanan dari yang paling moderat hingga yang paling radikal.

Sikap anti-AS juga dipicu oleh standar ganda yang diterapkan AS atas dunia Islam, berkaitan mengenai penegakkan Demokrasi. AS memang telah memproklamirkan diri sebagai penyebar perdamaian dan perdamaian hanya dapat tercapai dengan penegakkan demokrasi bukan totaliter. Alasan ini digunakan AS ketika akan menyerang Irak, tuduhan rezim totaliter dan radikal yang dijalankan Saddam Hussein dijadikan alasan utama oleh G.W. Bush, ini sejalan dengan pidato kebijakan tahun 2003, Duta Besar Richard Haass, menyatakan bahwa sebelum invansi Irak, pemerintah Republik dan Demokrat mempraktikkan “*democratic exceptionalism*” di dunia muslim demi kepentingan nasional.

Penolakan AS atas penggulingan rezim Shah di Iran yang kemudian digantikan oleh rezim radikal bentukan Khomeini. Kemudian bagaimana AS di era Bush senior mendukung tindakan militer Aljazair menghentikan proses demokrasi di negara itu karena melihat ada ancaman bagi kepentingan AS di sana akibat kemenangan kelompok “Islam politik”, FIS (*Front Islamique du Salut*). di Mesir AS juga terkesan mendiamkan ulah Mubarak yang melakukan pelanggaran HAM, pembatasan partisipasi politik rakyat dan penyempitan ruang politik hanya karena AS memiliki kecurigaan besar terhadap agenda revolusioner Ikhwanul Muslimin yang mana kelompok ini berpotensi besar naik ke permukaan bila pintu demokrasi dibuka lebar. Begitu juga bagaimana AS mendiamkan kudeta halus pihak militer Turki terhadap Perdana menteri Erbakan yang berasal dari partai Refah. Pengamanan akses minyak juga disenyalir sebagai salah satu kepentingan AS atas perbedaan sikap terhadap Islam moderat maupun radikal.

Kemenangan FIS di Aljazair, Ikhwanul Muslim di Mesir, atau kudeta halus Refah di Turki adalah penghalang bagi AS dalam mengontrol akses minyak, oleh karena itu penetapan sikap dengan membela rezim yang melawan Islam radikal yang tak sejalan dengan AS sangat tepat sebelum kelompok ini berhasil menguasai suatu rezim dan membuat perubahan – perubahan kebijakan yang tak lagi sesuai keinginan AS, meski itu berarti menutup mata atau menolak hasil pemilu demokratis di Iran, Mesir dan lain atau bahkan mempersenjatai pemberontak seperti di Darfur.

Kondisi – kondisi di Timur Tengah dengan dinamika perkembangan Islam politik ini kemudian membawa para pemikir maupun pembuat kebijakan AS berada pada dua kelompok berbeda ketika dalam proses pembentukan kebijak politik luar negeri. Kelompok pertama adalah kelompok yang beranggapan bahwa Islam radikal adalah kelompok yang anti-demokrasi dan anti barat serta berusaha menghancurkan tatanan kapitalisme Barat yang sekular. Kelompok ini berusaha menciptakan Islam radikal tak hanya sebagai musuh baru tapi juga musuh bersama masyarakat internasional.

Kelompok kedua beranggapan bahwa Islam radikal hanya minoritas ekstrimis yang hanya sedikit saja keberadaanya. Sikap radikal yang tumbuh di dunia Islam dianggap sebagai hasil dari kepedihan sosial-ekonomi dan politik yang diterapkan oleh Barat atas mereka sebagai akibatnya mereka menolak nilai – nilai Barat. Kelompok ini juga beranggapan bahwa Islam politik masih didominasi oleh kelompok moderat yang lebih toleran atas Barat dalam menyikapi kepedihan mereka tadi.

Lebih lanjut, demi menjaga kepentingan nasionalnya di dunia Islam AS memilih bersikap lunak atas kelompok Islam moderat dengan melakukan kompromi – kompromi atas Islam seperti membuka ruang dialog dan kerjasama agar nantinya kelompok moderat menjadi patner dalam meredam kelompok Islam radikal.

E. Hipotesa

Dengan memahami latar belakang masalah dan kerangka dasar pemikiran yang telah disampaikan, maka dapat ditarik hipotesa yaitu bahwa sikap berbeda yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat terhadap Islam radikal dan Islam moderat adalah sebagai upaya atau instrument politik luar negeri untuk melemahkan dan bahkan menghilangkan kekuatan Islam politik yang dianggap sebagai ancaman atas eksistensi kepentingan nasional Amerika Serikat di dunia Islam, dimana kepentingan nasional Amerika Serikat di dunia Islam, yaitu:

Pertama, kepentingan politik: Penyebaran Demokrasi di dunia Islam.

Kedua, kepentingan militer: Pencegahan Perkembangan Terorisme Internasional di Dunia Islam.

Ketiga, kepentingan ekonomi: Pengamanan akses minyak dan ekspansi pasar.

F. Metode Penulisan

Penulisan ilmiah ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan berdasarkan kerangka teori yang kemudian ditarik suatu hipotesa untuk dibuktikan dengan data – data empiris yang ditemukan berkaitan dengan tema penulisan. Penulisan ini bersifat library research, yaitu menggunakan metode kepustakaan yang nantinya menggunakan data – data sekunder seperti buku – buku ilmiah, jurnal – jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan lain – lain termasuk data berbasis situs – situs internet yang relevan dengan tema penulisan.

G. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penulisan dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang batas masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini. Dari tema yang dipilih, penulisan akan dimulai dari data – data tentang ada tidaknya interaksi antara AS dan Islam yang kemudian nanti pada akhirnya akan ditemukan data atau fakta mengenai perbedaan atas Islam oleh Amerika sebagai usaha menjalankan kepentingan nasionalnya, dimulai dari tahun 1979 yang dianggap sebagai kebangkitan Islam politik sampai dengan masa paska peristiwa 11 September 2001, yang diyakini sebagai momentum lahirnya sikap anti Islam politik di dunia Barat.

Namun demikian, jika nantinya ada pembahasan mengenai masalah yang tidak masuk pada jangkauan yang ditentukan, akan tetap dicantumkan dalam penulisan selama masih memiliki korelatifitas dan relevansi dengan pembahasan utama.

H. Sistematika Penulisan

BAB I :

Berisi penjelasan mengenai latarbelakang masalah, tujuan penulisan, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II :

Berisi penjelasan mengenai interaksi – interaksi yang pernah ada dan terjadi antara Amerika Serikat, sebagai representatif barat, dan Islam Politik.

BAB III :

Berisi penjelasan mengenai pengelompokkan Islam Politik oleh Amerika Serikat dan penjelasan sikap Amerika Serikat terhadap kelompok Islam radikal dan kelompok Islam moderat yang berbeda.

BAB IV :

Berisi penjelasan mengenai alasan berbedanya sikap Amerika Serikat terhadap kelompok Islam radikal dan Islam moderat.

BAB V :

Berisi kesimpulan atas pembahasan